

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang berperan penting dalam menjaga keberlangsungan hidup masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi daerah (Viona *et al.*, 2025). Ketersediaan pangan perlu diimbangi dengan harga yang terjangkau agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan konsumsi secara layak. Harga pangan juga menjadi salah satu indikator ketahanan pangan karena berkaitan langsung dengan daya beli dan kesejahteraan rumah tangga (Triana, 2023). Oleh karena itu, stabilitas harga bahan pokok strategis menjadi aspek penting dalam menjaga ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi masyarakat (Pujiyanto *et al.*, 2025).

Kondisi keterjangkauan harga bahan pokok strategis dapat dinilai berdasarkan posisi harga aktual terhadap batas harga yang ditetapkan pemerintah. Harga Eceran Tertinggi (HET) menjadi salah satu instrumen kebijakan yang digunakan untuk memberikan batas maksimum harga komoditas tertentu pada tingkat konsumen. Perbandingan harga aktual dengan HET dapat digunakan untuk mengetahui apakah harga suatu komoditas masih berada dalam batas yang ditetapkan atau telah melampaui batas tersebut. Harga yang berada di atas HET menunjukkan adanya tekanan terhadap keterjangkauan komoditas, sedangkan harga yang berada pada atau di bawah HET menunjukkan bahwa harga masih berada dalam batas kebijakan pemerintah (Mahdi & Rianzani, 2025). Dengan demikian, posisi harga terhadap HET menjadi salah satu dasar penting dalam menilai tingkat harga bahan pokok strategis pada setiap wilayah.

Posisi harga terhadap HET belum cukup untuk menggambarkan kondisi keterkendalian harga karena perubahan harga selama periode tertentu juga perlu diperhatikan. Fluktuasi harga menunjukkan tingkat perubahan harga dari waktu ke waktu sehingga dapat menggambarkan kestabilan pergerakan harga suatu komoditas. Perubahan harga pangan juga memiliki keterkaitan dengan perkembangan inflasi karena kenaikan harga komoditas pangan dapat meningkatkan tekanan harga pada tingkat konsumen. Nofitasari *et al.* (2025) menunjukkan adanya hubungan antara fluktuasi harga pangan dan perubahan inflasi di Kota Medan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kestabilan pergerakan harga bahan pokok strategis perlu menjadi bagian dalam pengukuran keterkendalian harga.

Kondisi harga bahan pokok strategis juga dapat berbeda antarwilayah meskipun komoditas yang dipasarkan memiliki jenis yang sama. Perbedaan disparitas tersebut berkaitan dengan kondisi wilayah produksi dan konsumsi, ketersediaan pasokan, serta karakteristik rantai distribusi yang menghubungkan antardaerah. Penelitian oleh Kurnia *et al.*, (2025) menemukan adanya disparitas harga beras pada 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan perbedaan harga mencapai Rp5.000/kg antara wilayah perkotaan sebagai pusat konsumsi dan wilayah produksi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa harga yang relatif stabil dari waktu ke waktu belum dapat menggambarkan keterkendalian secara menyeluruh apabila masih terdapat kesenjangan harga yang tinggi antarwilayah.

Perbedaan perkembangan fluktuasi harga antara Triwulan IV Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan bahwa kedua periode tersebut memiliki

kondisi yang berbeda untuk dibandingkan dalam menganalisis keterkendalian harga bahan pokok strategis. Triwulan IV Tahun 2025 memperlihatkan perkembangan inflasi yang relatif rendah dan stabil, sedangkan Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan perubahan pola dengan deflasi pada Januari yang kemudian diikuti inflasi pada Februari dan Maret dengan tingkat yang berbeda antarwilayah. Perubahan tersebut berlangsung bersamaan dengan meningkatnya ketidakpastian geopolitik di kawasan Timur Tengah pada awal 2026 yang turut mendorong kenaikan harga minyak dunia hingga sekitar 78-80 dolar Amerika Serikat per barel, lebih tinggi dibandingkan asumsi APBN sebesar 70 dolar Amerika Serikat per barel (Susilo, 2026). Kenaikan harga energi berpotensi meningkatkan biaya transportasi dan distribusi sehingga memberikan tekanan terhadap harga komoditas pangan di tingkat konsumen (Akbar & Syafri, 2026). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dinamika politik dan ekonomi global dapat memberikan dampak terhadap sektor pangan (Suhartien, 2025). Di sisi lain, ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, keterbatasan pasokan, serta distribusi yang belum merata juga menjadi faktor yang dapat memengaruhi perubahan harga bahan pokok strategis (Rahmatullah, 2025).

Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah penduduk 38,23 juta jiwa atau sekitar 13,4 persen dari total penduduk Indonesia. Besarnya jumlah penduduk tersebut menyebabkan kebutuhan terhadap bahan pokok strategis relatif tinggi sehingga keterjangkauan harga pangan menjadi faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Badan Pusat Statistik menetapkan sembilan kabupaten/kota sebagai daerah representasi Indeks Harga Konsumen (IHK), yaitu

Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas (Purwokerto), Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Rembang, Kabupaten Kudus, Kota Surakarta, Kota Semarang, dan Kota Tegal. Keberagaman kondisi geografis, aktivitas ekonomi, serta sistem distribusi pada wilayah-wilayah tersebut memungkinkan terjadinya perbedaan dinamika harga bahan pokok strategis antarwilayah.

Perkembangan inflasi di Provinsi Jawa Tengah turut menunjukkan adanya perubahan kondisi harga antara kedua periode tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, *inflasi year-on-year* meningkat dari 2,72 persen pada Desember 2025 menjadi 4,43 persen pada Februari 2026, (Badan Pusat Statistik, 2026) Perubahan tersebut memberikan gambaran adanya peningkatan tekanan harga pada awal 2026. Namun, inflasi merupakan ukuran perubahan harga secara umum sehingga belum dapat menunjukkan kondisi keterkendalian masing-masing bahan pokok strategis. Analisis terhadap harga komoditas secara langsung tetap diperlukan untuk mengetahui posisi harga terhadap HET, tingkat perubahan harga, serta perbedaan harga antarwilayah.

Tabel I-1 Perbandingan Tingkat Inflasi *m-to-m* (%) Oktober 2025-Maret 2026 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (2022=100)

Kabupaten/Kota	Bulan					
	Okt (2025)	Nov (2025)	Des (2025)	Jan (2026)	Feb (2026)	Mar (2026)
Cilacap	0,33	0,14	0,53	-0,42	0,80	0,70
Purwoketo	0,33	0,14	0,58	-0,36	0,78	0,68
Wonogiri	0,44	0,23	0,59	-0,51	0,76	0,92
Rembang	0,37	0,19	0,79	-0,52	0,79	0,53
Kudus	0,45	0,20	0,26	-0,29	0,83	0,87
Kota Surakarta	0,40	0,20	0,48	-0,26	0,74	0,47

Kabupaten/Kota	Bulan					
	Okt (2025)	Nov (2025)	Des (2025)	Jan (2026)	Feb (2026)	Mar (2026)
Kota Semarang	0,49	0,22	0,46	-0,38	0,90	0,48
Kota Tegal	0,39	0,22	0,42	-0,25	0,67	0,37
Provinsi Jawa Tengah	0,41	0,14	0,41	-0,24	0,86	0,54

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2025-2026, (diolah).

Berdasarkan Tabel I-1, seluruh kabupaten/kota IHK di Provinsi Jawa Tengah mengalami inflasi pada Oktober-Desember 2025 dengan tingkat yang relatif rendah. Inflasi Provinsi Jawa Tengah tercatat sebesar 0,41 persen pada Oktober 2025, menurun menjadi 0,14 persen pada November, kemudian meningkat menjadi 0,41 persen pada Desember 2025. Memasuki Januari 2026, seluruh kabupaten/kota IHK mengalami deflasi dengan kisaran -0,24 persen hingga -0,52 persen. Kondisi tersebut berubah pada Februari 2026 ketika seluruh wilayah kembali mengalami inflasi. Kota Semarang mencatat tingkat inflasi tertinggi sebesar 0,90 persen, sedangkan Kota Tegal mencatat tingkat terendah sebesar 0,67 persen. Pada Maret 2026, Kabupaten Wonogiri mencatat tingkat inflasi tertinggi sebesar 0,92 persen, sedangkan Kota Tegal mencatat tingkat terendah sebesar 0,37 persen.

Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo *et al.*, (2023) menunjukkan bahwa setiap komoditas pangan memiliki tingkat fluktuasi harga yang berbeda sesuai karakteristik produksinya. Komoditas hortikultura cenderung mengalami fluktuasi harga yang lebih tinggi dibandingkan komoditas sereal karena dipengaruhi oleh faktor musim dan keterbatasan daya simpan. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Bahtiar & Raswatie, 2023) juga menunjukkan bahwa distribusi pasokan dan

kondisi pasar daerah memiliki pengaruh besar terhadap perubahan harga pangan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa fluktuasi harga pangan masih menjadi persoalan yang terus terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

Meskipun kajian mengenai harga pangan telah banyak dilakukan, penelitian yang membandingkan tingkat keterkendalian harga bahan pokok strategis antartriwulan pada tingkat kabupaten/kota masih relatif terbatas, khususnya pada sembilan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada satu periode pengamatan sehingga belum banyak memberikan gambaran mengenai perbedaan tingkat keterkendalian harga antarperiode berdasarkan indikator tingkat harga, fluktuasi harga, dan disparitas harga di 9 Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah. Kondisi tersebut mendorong dilakukannya penelitian berjudul **"Analisis Komparatif Tingkat Keterkendalian Harga Bahan Pokok Strategis antara Triwulan IV Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2026 di 9 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah"** untuk menganalisis dan membandingkan tingkat keterkendalian harga bahan pokok strategis pada kedua periode menggunakan data mingguan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP). Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi keterkendalian harga bahan pokok strategis pada sembilan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, mendukung pengendalian inflasi daerah, serta merumuskan kebijakan stabilisasi harga yang lebih tepat sasaran.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, harga bahan pokok strategis di sembilan kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah menunjukkan dinamika yang berbeda antarperiode dan antarwilayah. Perubahan kondisi harga tersebut tercermin dari adanya perbedaan tingkat harga, fluktuasi dan disparitas harga bahan pokok strategis antara Triwulan IV Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2026. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya dilakukan analisis untuk mengetahui perbedaan tingkat harga, fluktuasi dan disparitas harga bahan pokok strategis pada kedua periode pengamatan di 9 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat harga bahan pokok strategis terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) pada Triwulan IV Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2026 di 9 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana tingkat fluktuasi harga bahan pokok strategis pada Triwulan IV Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2026 di 9 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana tingkat disparitas harga bahan pokok strategis pada Triwulan IV Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2026 di 9 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah?
4. Apakah terdapat perbedaan tingkat harga, fluktuasi harga, dan disparitas harga bahan pokok strategis antara Triwulan IV Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2026 di 9 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah adalah langkah yang diambil untuk mempersempit ruang lingkup permasalahan yang terlalu luas, sehingga penelitian dapat dilakukan dengan lebih terfokus. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Objek Penelitian

Objek penelitian difokuskan pada komoditas bahan pokok strategis yang dipantau dalam Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, meliputi beras, kedelai impor, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang putih, bawang merah, cabai rawit merah, cabai merah keriting, gula konsumsi, dan minyak goreng. Pemilihan komoditas tersebut didasarkan pada perannya sebagai komoditas pangan strategis yang memiliki pengaruh terhadap stabilitas harga pangan, pengendalian inflasi, dan perlindungan daya beli masyarakat.

Penetapan komoditas mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 299 Tahun 2025, Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 dan Nomor 12 Tahun 2024, serta Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1028 Tahun 2024 mengenai Harga Eceran Tertinggi dan pembelian di tingkat konsumen. Sementara itu, komoditas kedelai lokal tidak dimasukkan dalam penelitian karena ketersediaan data harga yang tidak lengkap selama periode pengamatan.

2. Sumber dan periode data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa data harga komoditas bahan pokok strategis yang diperoleh dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan. Periode penelitian mencakup Triwulan IV Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2026, yaitu Oktober 2025 sampai dengan Maret 2026. Data harga yang digunakan dalam penelitian ini berupa data mingguan yang diperoleh dari data pemantauan harga yang tersedia pada SP2KP. Data mingguan tersebut digunakan untuk menganalisis tingkat harga, fluktuasi harga, dan disparitas harga bahan pokok strategis pada periode penelitian. Data penelitian mencakup sembilan kabupaten/kota yang menjadi wilayah representasi Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas (Purwokerto), Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Rembang, Kabupaten Kudus, Kota Surakarta, Kota Semarang, dan Kota Tegal.

Data harga komoditas yang digunakan bersumber dari pasar yang menjadi lokasi pemantauan SP2KP dan digunakan sebagai representasi kondisi harga pada masing-masing wilayah. Pasar yang menjadi sumber data meliputi Pasar Sidodadi untuk Kabupaten Cilacap, Pasar Wage untuk Kabupaten Banyumas, Pasar Induk Wonosobo untuk Kabupaten Wonosobo, Pasar Wonogiri untuk Kabupaten Wonogiri, Pasar Kota Rembang untuk Kabupaten Rembang, Pasar Bitingan untuk Kabupaten Kudus, Pasar Legi

untuk Kota Surakarta, Pasar Johar untuk Kota Semarang, dan Pasar Pagi Kota Tegal untuk Kota Tegal.

3. Ruang lingkup analisis

Penelitian ini dibatasi pada analisis perubahan harga komoditas, tingkat fluktuasi harga, disparitas harga di 9 kab/kota Provinsi Jawa Tengah, serta perbandingan tingkat keterkendalian atau stabilitas harga bahan pokok strategis antara Triwulan IV Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2026 pada sembilan kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Analisis dilakukan berdasarkan data harga mingguan yang tersedia dalam SP2KP.

Faktor-faktor yang dapat memengaruhi perubahan harga, seperti kondisi produksi, distribusi pangan, kebijakan pemerintah, maupun dinamika ekonomi global, tidak dianalisis secara khusus dalam penelitian ini, melainkan hanya digunakan sebagai informasi pendukung dalam pembahasan hasil penelitian.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini disusun untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan, yaitu:

1. Menganalisis tingkat harga bahan pokok strategis berdasarkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada Triwulan IV Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2026 di 9 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.
2. Menganalisis tingkat fluktuasi harga bahan pokok strategis pada Triwulan IV Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2026 di 9 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.

3. Menganalisis tingkat disparitas harga bahan pokok strategis pada Triwulan IV Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2026 di 9 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.
4. Menganalisis perbedaan tingkat harga, fluktuasi harga, dan disparitas harga bahan pokok strategis antara Triwulan IV Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2026 berdasarkan di 9 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ekonomi regional dan ekonomi pangan, khususnya mengenai keterkendalian atau stabilitas harga bahan pokok strategis pada tingkat kabupaten/kota.
 - b. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan analisis perubahan harga komoditas, fluktuasi harga, disparitas harga di 9 kab/kota Provinsi Jawa Tengah, serta perbandingan tingkat keterkendalian harga bahan pokok strategis antarperiode.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan informasi dan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok.
 - b. Menjadi sumber informasi bagi pelaku usaha pangan, seperti pedagang dan distributor, dalam memahami dinamika perubahan harga bahan pokok strategis antarperiode dan antarwilayah.

- c. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kondisi perubahan harga dan keterkendalian harga bahan pokok strategis pada 9 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

